

**PEMBINAAN UMAT HINDU DI JAWA TIMUR
(ANALISIS TERHADAP KONSEP IKSA, SAKTI, DESA, KALA, DAN TATTWA
DALAM PEMBINAAN UMAT HINDU DI WILAYAH KECAMATAN AMPELGADING,
MALANG, JAWA TIMUR)**

**FOSTERING OF HINDUS IN EAST JAVA
(ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF IKSA, SAKTI, DESA, KALA, AND TATTWA
FOR DEVELOPMENT OF HINDUS IN THE DISTRICT OF AMPELGADING,
MALANG, EAST JAVA)**

SUGIARTI

STAH Dharma Sentana Sulawesi Tengah
giartijaya@yahoo.co.id

ABSTRACT

Development of Hindus in various places, especially in the District of Ampelgading, Malang is still lacking. One contributing factor was the weak organization of Hindu public relations, and the lack of guidance officers. The deficiencies in question involve two things, namely lacking in quantity, and lacking in quality. There is a lack of quantity because there are not many people who have interest and ability in the field of religious formation.

Deficiencies in quality, in general Hindu figures who act as coaches, both those who sit in the management of parisada, stakeholders, serathi, kelian adat, and so on; not many have comprehensive knowledge in the field of religion. Religious knowledge is limited to rituals based on traditions and customs, or introduction to new cultures in religious rituals; sometimes there are differences between one region and another. Not infrequently this has become a polemic that eventually became the seeds of problems in Hindu society, especially in the area of Ampelgading District, Malang Regency, East Java Province.

Keywords: Coaching, Hindus in East Java, Iksa, Sakti, Village, Kala, and Tattwa.

ABSTRAK

Pembinaan terhadap umat Hindu di berbagai tempat, khususnya di wilayah Kecamatan Ampelgading, Malang tergolong masih kurang. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya organisasi keumatan Hindu, dan kurangnya petugas pelaksana pembinaan. Kekurangan yang dimaksud menyangkut dua hal, yakni kurang secara kuantitas, dan kurang secara kualitas. Adanya kekurangan secara kuantitas karena orang-orang yang memiliki ketertarikan dan kemampuan dalam bidang pembinaan agama belum banyak.

Kekurangan secara kualitas, secara umum tokoh-tokoh Hindu yang berperan sebagai pembina, baik yang duduk dalam kepengurusan parisada, *pemangku*, *serathi*, *kelian adat*, dan sebagainya; tidak banyak yang memiliki pengetahuan secara komprehensif dalam bidang agama. Pengetahuan agama yang dimiliki sebatas pada tatacara beritual yang didasarkan pada tradisi dan adat istiadat, ataupun pengenalan terhadap budaya baru dalam ritual keagamaan; yang kadang-kadang terdapat perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Tidak jarang hal ini justru menjadi polemik yang akhirnya menjadi bibit permasalahan dalam masyarakat Hindu, terutama di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Pembinaan, umat Hindu di Jawa Timur, Iksa, Sakti, Desa, Kala, dan Tattwa.

I. PENDAHULUAN

Umat Hindu di Jawa Timur secara umum dapat dikatakan masih dalam taraf “mencari bentukgi,” terutama dalam hal penerapan budaya

agama. Artinya, dalam pelaksanaan ritual keagamaan kadang-kadang masih mencari barometer dalam menjalankannya. Tentu saja yang sering dijadikan acuan dalam

menjalankan ritual adalah Bali. Hal ini dapat terlihat di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Umat yang terdapat di wilayah tersebut adalah umat Hindu etnis Jawa; dan hidup berdampingan dengan umat beragama lain, baik penganut agama Islam, maupun Kristen, yang juga berasal dari etnis Jawa dan Madura. Menurut penjelasan pengurus PHDI Kecamatan Ampelgading bahwa umat Hindu yang terdapat di wilayah Ampelgading terkonsentrasi di beberapa desa, yakni Desa Wirotaman, Desa Sumber Rangkul, dan Desa Sidorengo, dengan jumlah ± 195 kepala keluarga (KK). Itu artinya, keberadaan umat di wilayah Kecamatan Ampelgading cukup besar, sehingga perlu pembinaan yang berkesinambungan, agar terdapat kepercayaan diri sebagai penganut Hindu, dan kuat dalam mempertahankan *sraddha* (keyakinan), sehingga tidak mudah beralih (konversi) agama.

Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu adanya strategi dalam pembinaan keagamaan. Pembinaan yang dimaksud adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahannya, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya dan berhasil guna dalam mencapai tujuan *Jagadhita* (kesejahteraan hidup jasmani) dan *Moksa* (kebahagiaan hidup rohani) menurut ajaran Hindu (PHDI, 1993: 4).

Pembinaan terhadap umat Hindu sangatlah diperlukan, mengingat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Hindu di daerah Malang sangatlah kompleks, baik tantangan eksternal (tantangan yang muncul dari luar), maupun internal (tantangan yang muncul dari dalam). Guna menghadapi hal tersebut, perlu diadakan pembinaan agar menjadi masyarakat yang mandiri, percaya diri, dan mampu berpartisipasi dengan baik dalam membangun bangsa. Namun untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya pedoman-pedoman dalam pembinaan umat dengan “sentuhan” yang modern dan sesuai dengan ajaran pustaka suci.

Dalam tulisan ini juga akan disajikan strategi pembinaan umat dengan memakai prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam pustaka suci Manawadharma Sastra, yakni: *Iksa* (penglihatan ke depan/visi), *Sakti* (kemampuan), *Desa* (tempat), *Kala* (waktu), *Tattwa* (kebenaran, pemikiran).

II. PEMBAHASAN

2.1 Pedoman Pembinaan Umat Hindu Dharma Indonesia

Berdasarkan Naskah Pedoman Pembinaan Umat Hindu Dharma Indonesia, yang merupakan hasil konsultasi Pemuka Umat/Pandita Hindu dengan Pejabat-pejabat Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Budha, Departemen Agama RI pada tahun 1987, maka dalam upaya pembinaan agama Hindu dapat menggunakan metode, antara lain: *Dharma Wacana*, *Dharma Gita*, *Dharma Tula*, *Dharma Yatra*, *Dharma Sadana*, dan *Dharma Santi*.

a) *Dharma Wacana*

Dharma wacana merupakan model pendekatan kepada pengurus lembaga keagamaan dan kepada masyarakat melalui ceramah (informasi satu arah dari pembina kepada *audience* yang dibina) (Tim, 2005: 26). Definisi yang lain adalah penerangan agama Hindu yang disampaikan pada setiap kesempatan di hadapan umat Hindu yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.

Zaman dahulu, kegiatan penerangan ini disebut *upanisad*. Terminologi *upanisad* mengandung arti dan isi yang sifatnya *rahasyapadesa*, yakni ajaran rahasia yang diberikan oleh seorang guru spiritual kepada siswanya dalam jumlah yang terbatas dan terpilih. Kegiatan *upanisad* juga tidak dilakukan pada sembarang tempat dan waktu. Hal ini karena sesuatu yang disampaikan oleh gurunya adalah ajaran rahasia.

Dharma Wacana untuk masa sekarang ini, dimaksudkan sebagai metode penerangan agama Hindu yang diberikan secara umum kepada umat Hindu sesuai dengan sifat, tema, jenis kegiatan keagamaan yang dilaksanakan menurut *desa* (tempat), *kala* (waktu),

dan *patra* (keadaan). Tujuan dari *Dharma Wacana* adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan penghayatan yang mengarah pada penguatan *sraddha* umat Hindu, guna membentuk manusia yang *asthiti bhakti*. Agar *Dharma Wacana* menarik, perlu pemilihan materi yang tepat, aktual dan sesuai dengan realitas masyarakat. Penyampaiannya juga harus menggunakan bahasa lugas, mudah dimengerti, dan tidak bertele-tele.

b) *Dharma Gita*

Dharma Gita diartikan sebagai nyanyian keagamaan. Secara tradisional, *Dharma Gita* sudah dikenal di seluruh Indonesia. Kegiatan ini di Jawa disebut *kidungan*, dan *macapat*, sedangkan di Bali dikenal istilah *makakawin*, *magaguritan* atau *mamutru*. Istilah yang lain adalah *bhajan*. Tujuan adanya *Dharma Gita* adalah sebagai media untuk menyampaikan dan memperdalam keyakinan agama Hindu.

Mengacu pada konsep adaptasi, dan mengikuti perkembangan zaman, maka pada masa sekarang ini diperlukan adanya suatu kreasi baru dalam ber-*dharma gita*. Anak-anak muda zaman sekarang sangat dekat dengan irama lagu-lagu pop, keroncong, jazz, dan sebagainya, sedangkan yang bercorak kedaerahan atau musik yang bernuansa etnik seperti irama *Langgam* (Jawa Tengah), *Kendang Kempul* (Banyuwangi, Jawa Timur), atau lagu yang bernuansa kedaerahan lainnya. Selama tidak bertentangan dengan etika Hindu dan temanya diarahkan pada penguatan *sraddha* dan memberikan sentuhan rohani, maka perlu juga diupayakan lagu-lagu rohani Hindu yang berirama pop, langgam, campur sari, dan sebagainya; yang terpenting bagi umat Hindu adalah dapat membedakan antara *Dharma Gita* untuk sesuatu yang sakral, yang tujuannya untuk pemujaan; dan yang profan, yang tujuannya untuk hiburan yang bernuansa rohani.

Guna memantapkan dan mengembangkan kegiatan *Dharma Gita* sebagai sarana pembinaan umat Hindu,

maka kegiatan perlombaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Utsawa Dharma Gita* dan *Utsawah Veda Patha* perlu digalakkan. Untuk di wilayah Kabupaten Malang, kegiatan seperti ini telah dilaksanakan mulai tingkat desa sampai tingkat provinsi, bahkan delegasi dari Jawa Timur juga berpartisipasi mengirimkan pesertanya untuk tingkat Nasional.

c) *Dharma Tula*

Kata *Tula* berasal dari bahasa Sanskerta, artinya pertimbangan, keserupaan, bertimbang. Berdasarkan etimologinya *Dharma Tula* dapat diartikan dengan bertimbang, berdiskusi, atau berdialog tentang ajaran agama Hindu dan Dharma.

Dharma Tula merupakan metode pendalaman ajaran-ajaran agama Hindu melalui peningkatan peran serta yang aktif dari semua peserta; oleh karena itu melalui metode ini setiap peserta akan memperoleh kesempatan mengemukakan pendapatnya, atau sebaliknya menerima pendapat orang lain yang akan menambah pengetahuannya dalam bidang agama Hindu dengan dilandasi sikap tenggang rasa dan kekeluargaan. Kegiatan *Dharma Tula* bertujuan untuk mengembangkan persepsi baru tentang ajaran agama Hindu yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada, atau sesuai dengan realitas di masyarakat.

Materi *Dharma Tula* disesuaikan dengan tingkat pemahaman serta permasalahan yang dihadapi oleh kelompok yang akan membahasnya. Misalnya dalam kelompok remaja dapat diketengahkan materi ajaran agama Hindu yang berkaitan dengan kehidupan dan permasalahan remaja (kepemudaan), dengan demikian kegiatan *Dharma Tula* ini dapat mencapai sasaran. Namun, akhir-akhir ini ada semacam *trend* di kalangan generasi muda Hindu. Ormas kepemudaan Hindu tidak hanya mengambil tema tentang agama, tetapi juga tentang ekonomi, sosial politik, dan pemberdayaan masyarakat. Jika dicermati, sebenarnya *Dharma Tula* juga bisa dilakukan melalui bantuan teknologi, seperti yang saat ini marak

dilakukan dengan menggunakan sosial media.

d) *Dharma Yatra*

Dharma Yatra mempunyai pengertian yang hampir sama dengan *Tirta Yatra*, yakni usaha untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Hindu melalui kunjungan dan persembahyangan ke tempat-tempat suci. Konsep *Dharma Yatra*, dalam usaha pembinaan masyarakat Hindu di Wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur dapat dikembangkan lebih jauh; tidak hanya mengunjungi dan bersembahyang di tempat-tempat suci yang dikunjungi, tetapi peserta *Dharma Yatra* diharapkan dapat bertemu langsung dan mengadakan pembinaan pada masyarakat sekitar tempat-tempat suci yang dikunjungi.

e) *Dharma Sadhana*

Dharma Sadhana artinya realisasi ajaran Dharma dalam diri seseorang. Hal ini dapat dilaksanakan melalui *Catur Marga Yoga*, yakni: *Bhakti*, *Karma*, *Jnana* dan *Raja Yoga* atau *Marga* secara terpadu, bulat dan utuh. Selama ini masyarakat Hindu secara umum masih mengembangkan *Bhakti* dan *Karma Marga*, sehingga ke depan perlu lebih intensif memasyarakatkan dan mengembangkan *Jnana* dan *Yoga Marga*. Tujuan *Dharma Sadhana* adalah untuk membina, mengembangkan dan memupuk keluhuran budi pekerti dan kesucian pribadi sehingga kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara semakin mantap dan kokoh.

f) *Dharma Santi*

Dharma Santi adalah suatu acara berupa pertemuan untuk saling maaf-memaafkan atas segala noda, dan kekhilafan di antara sesama umat manusia. Acara *Dharma Santi* untuk *Umupaksama* ini dapat dilaksanakan sesuai dengan keperluan situasi dan relevansinya dengan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Masyarakat Hindu di Wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur mengadakan *Dharma Santi* setiap perayaan Tahun Baru Saka pada

bulan *Caitra*. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tingkat desa hingga tingkat provinsi.

2.2 Pekerja Sosial Hindu dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Umat Hindu di Wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

Tugas pembinaan masyarakat Hindu tidak hanya menjadi tugas PHDI maupun petugas penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama, tetapi juga menjadi tugas bersama lembaga-lembaga keumatan dan Organisasi Massa (ormas) Hindu, serta orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap dinamika Hindu. Mengingat kondisi masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, maka pembinaan masyarakat harus dilaksanakan secara intensif, kontinyu dan profesional. Berangkat dari hal tersebut diperlukan adanya petugas khusus, yakni sekumpulan orang yang bertugas sebagai pekerja sosial (*social worker*) dalam masyarakat Hindu.

Pekerja Sosial menurut Suharto (2006: 24) merupakan aktivis profesional yang mandat utamanya adalah memberikan pelayanan kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang membutuhkannya sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan dan ketrampilan profesional pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial yang dimaksud adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial, dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Zastrow dalam Suharto, 2006: 24).

Berdasarkan definisi tersebut, pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial Hindu adalah mendorong adanya pemecahan masalah-masalah keumatan dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan sumber daya manusia, serta perbaikan masyarakat. Pekerja sosial Hindu

dalam melaksanakan tugasnya akan selalu mengadakan kontak langsung dengan masyarakat, sehingga para pekerja sosial tersebut harus dapat dan mampu berinteraksi secara baik, dan membina hubungan yang jujur dengan masyarakat. Hal tersebut bertujuan, supaya terjalin kerja sama yang bermanfaat. Pekerja sosial harus percaya kepada kemampuan dan kemauan baik masyarakat, dan kepercayaan ini perlu diungkapkan dalam perkataan ataupun tingkah laku.

Jomo (1986: 192) menjelaskan bahwa kepercayaan yang positif kepada masyarakat akan membantu mereka membangkitkan dan mengembangkan rasa percaya dirinya. Selain itu pekerja sosial juga harus dapat memotivasi masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam bermacam-macam kesulitan masyarakat. Pekerja Sosial Hindu dalam upaya memecahkan masalah-masalah sosial keumatan, mengembangkan strategi pendampingan sosial. Dalam konteks ini, peranan pekerja sosial Hindu berada dalam kapasitas sebagai pendamping, bukan sebagai pemecah masalah (*problem solver*) secara langsung.

Berdasarkan strategi tersebut, masyarakat didorong untuk dapat mengorganisasikan dirinya dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif dalam memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Pendampingan sosial menurut Suharto (2006: 94) dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara masyarakat dan pekerja sosial untuk bersama-sama menghadapi beragam tantangan, seperti: (1) merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (2) memobilisasi sumber daya setempat, (3) memecahkan masalah sosial, (4) menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, (5) menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Mengacu pada peranan, tugas, dan fungsi pekerja sosial, maka para pekerja sosial dalam masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa

Timur, pada prinsipnya adalah sebagai agen perubahan (*agent of change*), atau pelaku perubahan dalam masyarakat. Berpijak pada hal-hal tersebut, kegiatan pekerja sosial Hindu Wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selain melaksanakan pembinaan juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat Hindu dengan cara membangkitkan potensi dasar umat Hindu, baik dalam kehidupan sosial maupun agama sesuai dengan ajaran Hindu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Hindu melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada, dengan menekankan pada prinsip partisipasi sosial.

Mahardika (2006: 57) menjelaskan, dalam pemberdayaan, pekerja sosial perlu mendasarkan diri pada prinsip pemihakan pada kelompok-kelompok yang lemah, kurang berdaya, rentan, kelompok masyarakat yang *marginal*, atau korban kesewenang-wenangan, agar mempunyai posisi dan kekuatan tawar menawar, sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah posisinya. Kondisi masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang terkesan rentan terhadap konversi, dan kurang berdaya, tidak terlepas dari adanya masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat, baik yang berasal dari eksternal maupun internal.

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat Hindu, termasuk di dalamnya adalah adanya upaya kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk menghambat perkembangan agama Hindu dengan cara melakukan *konversi* terhadap umat Hindu, dan memunculkan *stigma* bahwa agama Hindu adalah agama yang primitif, menyembah patung, mengundang setan, menyembah sapi dan sebagainya. Proses ini dikemas sedemikian rupa agar tidak menimbulkan benturan dan ketersinggungan sosial; sehingga umat Hindu tidak merasa dilecehkan,

sebaliknya merasa diberi pengertian bahwa agama Hindu kurang sempurna. Akibatnya umat Hindu merasa kurang percaya diri sebagai penganut Hindu. Hal-hal seperti ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi juga terjadi di dunia pendidikan.

Birokrasi pemerintahan juga menjadi masalah bagi masyarakat Hindu. Hal ini berkaitan dengan adanya pandangan mayoritas-minoritas yang ada di Indonesia. Liliweri (2005: 99) mengemukakan bahwa di Indonesia secara nasional orang selalu mengatakan Indonesia bukan negara Islam, tetapi Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam; dan Indonesia memandang mayoritas dan minoritas (apalagi menyentuh agama) sebagai sebuah "beban" sosial dan kultur.

Permasalahan berikutnya adalah rumitnya masalah perkawinan. Dalam Kementerian Agama terdapat Kantor Urusan Agama (KUA). Lembaga pemerintah ini hanya digunakan oleh umat beragama Islam. Kantor Urusan Agama terdapat di tiap-tiap kecamatan dengan petugas khusus (pegawai negeri), sedangkan penganut agama lain, termasuk umat Hindu melakukan perkawinan di petugas khusus, yakni Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (P4), atau di masyarakat dikenal dengan istilah "Pencatat Sipil." Petugas ini tidak berstatus pegawai negeri, tetapi ditunjuk oleh lembaga yang ada pada agamanya masing-masing.

Proses administrasi perkawinan melalui KUA dan Pencatat Sipil pun juga berbeda. Persyaratan perkawinan melalui KUA relatif lebih sedikit dari pada yang dilakukan oleh Pencatat Sipil, yaitu akta kelahiran, fotokopi KTP, fotokopi KK, akta perkawinan orang tua, akta perceraian orang tua, jika orang tua bercerai, surat keterangan kematian, jika salah satu dari kedua orang tuanya meninggal, tanpa menggunakan meterei, surat pernyataan belum pernah kawin, dan tidak ada izin dari orang tua. Sedangkan perkawinan melalui pencatat Sipil, seluruh persyaratan

harus terpenuhi (disarikan dari hasil wawancara).

Faktor internal, berasal dari masyarakat Hindu sendiri. Hal ini menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Hindu yang masih tergolong lemah. Ini terlihat dengan adanya ketertinggalan-ketertinggalan atau kemiskinan-kemiskinan yang ada. Ketertinggalan-ketertinggalan yang terdapat dalam masyarakat Hindu, antara lain :

1) Kemiskinan Ekonomi

Kemiskinan ekonomi dialami oleh masyarakat Hindu, karena sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani, buruh, dan kerja serabutan. Selain itu sebagian besar masih bergulat dengan pemenuhan kebutuhan primer.

2) Kemiskinan Pendidikan

Kemiskinan jenis ini ada dua macam, yakni : pertama, kemiskinan pendidikan umum. Hal ini jelas dapat diamati apabila terjun langsung ke masyarakat Hindu. Sebagian besar dari anak-anak tidak lebih dari jenjang pendidikan menengah, baik SMP, maupun SMA. Hanya beberapa yang bisa melanjutkan hingga ke Perguruan Tinggi (PT). Kedua, kemiskinan terhadap pendidikan agama Hindu. Sudah menjadi agenda tahunan di Jawa Timur tentang keluhan-keluhan karena minimnya guru agama Hindu, tiadanya guru agama Hindu di sekolah, guru agama Hindu yang tidak mengajar agama Hindu, perlakuan yang cukup diskriminatif terhadap anak-anak Hindu di sekolah, sulitnya memperoleh bahan-bahan bacaan agama Hindu, dan masih banyak lagi daftar kesulitan yang harus mereka hadapi.

3) Kemiskinan Sosial

Secara umum masyarakat Hindu di Jawa kurang percaya diri sebagai umat Hindu. Hal ini karena adanya tekanan-tekanan sosial, seperti adanya berbagai pertanyaan dan pernyataan umat lain yang bernada melecehkan tentang ajaran Hindu yang mereka anggap sebagai agama primitif. Selain itu juga adanya komentar tentang penyimpangan-penyimpangan yang

dilihat di Bali, seperti *metajen* saat upacara agama, *meceki* pada saat Nyepi, dan sebagainya. Umat Hindu dari Jawa, apalagi yang tidak pernah ke Bali jelas tidak bisa menjawab. Tekanan yang lain adalah seringnya terjadi kekeliruan agama dalam penulisan KTP, urusan perkawinan yang *bertele-tele*, serta berbagai diskriminasi dalam mencari dan memperoleh pekerjaan. Akibat dari kemiskinan sosial ini, di wilayah Jawa Timur banyak dijumpai adanya umat Hindu yang identitas formalnya bukan Hindu.

Mengacu pada problem-problem tersebut, pembinaan dan pemberdayaan Hindu bukan semata diarahkan pada upaya perbaikan kualitas hidup jangka pendek dalam bidang, agama, seni budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan, tetapi secara strategis juga diarahkan pada proses untuk memungkinkan adanya transformasi tatanan. Bagaimanapun juga tatanan perlu dilihat sebagai salah satu pusat masalah, yang bila tidak terjadi transformasi, maka berbagai masalah yang ada, tidak pernah dapat diselesaikan secara tuntas.

Usaha pembinaan dan pemberdayaan pada masyarakat Hindu di Wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur dipandang sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2006: 59-60).

Hal yang perlu dipahami bahwa upaya pembinaan terhadap masyarakat Hindu harus dilakukan melalui kerja sama. Maksudnya pekerja sosial Hindu perlu kerja sama dan bersinergi dengan

instansi resmi pemerintahan seperti penyuluh dari Kementerian Agama, Organisasi Massa (ormas) Hindu, yakni Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH) Indonesia, dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDHI), Wanita Hindu Dharma Indonesia, dan majelis tertinggi Hindu, yaitu PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia). Jika memungkinkan sangat diperlukan juga kerja sama dengan lembaga atau organisasi lain di luar Hindu, hal ini dimaksudkan untuk membuka jalan, agar eksistensi Hindu diakui oleh pihak lain.

Masyarakat Jawa mengenal sistem “ketokohan” dalam masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan oleh pekerja sosial. “Ketokohan” yang dimaksud adalah individu yang “dituakan” (*sesepeuh*) walaupun secara umur sebetulnya bukan yang paling tua di antara anggota masyarakat Hindu, tetapi keberadaannya dijadikan panutan oleh masyarakat. Sesepeuh ini bukan suatu jabatan dalam struktur sosial kegamaan, tetapi lebih mengarah pada predikat penghormatan yang diberikan oleh umat Hindu karena telah berjasa, mempunyai karisma, dan mempunyai kelebihan dibandingkan umat Hindu yang lain. Tugas seorang pekerja sosial adalah merangkul tokoh ini, diajak secara bersama-sama, karena jika tidak, *sesepeuh* ini akan merasa “tidak ditempatkan”, atau dalam istilah Jawa “*ora di wongke*”. Akibat yang terjadi justru akan menjadi penghambat perubahan.

Mahardika (2006: 59) mengemukakan, suatu strategi yang baik, dalam hal ini tidak hanya ditentukan oleh suatu kecerdasan individual, melainkan oleh hasil kerja bersama, terutama untuk bisa memperoleh data yang akurat mengenai masalah-masalah sosial yang menjadi “tujuan perubahan” dan kekuatan yang tidak menghendaki perubahan tersebut. Kecerdasan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, ataupun semangat berjuang yang dimiliki oleh seseorang dalam membina umat Hindu, jika dilakukan sendiri, hasilnya tidak maksimal, apalagi jika arah gerakan tersebut untuk membuka jalan

perubahan. Sesuatu yang perlu diupayakan dalam usaha pemberdayaan umat Hindu adalah kerja sama yang baik antar pemimpin atau pembina umat, masyarakat dan lembaga keumatan.

Para pekerja sosial dalam menjalankan tugas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Hindu di Wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, harus melakukan analisa yang komprehensif tentang masyarakat dan lingkungannya. Hal tersebut dilakukan agar kehadiran pekerja sosial tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat Hindu, dan masyarakat lebih luas pada umumnya. Sebaliknya, kehadiran pekerja sosial Hindu diharapkan mampu membangkitkan kesadaran beragama, memantapkan *sradha*, dan dapat memberikan motivasi dalam menggali potensi umat Hindu dan rasa percaya diri, dengan tujuan dapat tercipta suasana yang harmonis dalam masyarakat, khususnya masyarakat Hindu.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebelum terjun secara langsung ke masyarakat, para pekerja sosial Hindu perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang situasi, kondisi, dan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran pembinaan dan pemberdayaan. Bekal pengetahuan itu didapatkan dari kegiatan analisa, yang dalam pembahasan ini disebut sebagai analisis sosial, yakni suatu usaha untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang situasi sosial, hubungan-hubungan struktural, kultural dan historis, sehingga memungkinkan untuk menangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi (Mahardika, 2006: 94-95). Pelaksanaan analisis sosial bertujuan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah pada sasaran.

Analisis sosial yang dilakukan terhadap masyarakat Hindu di Wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dapat berupa usaha pemahaman terhadap situasi yang berkembang di wilayah tersebut; termasuk di dalamnya

menyangkut keamanan, pergaulan sosial antara umat Hindu dengan umat Hindu, dan umat Hindu dengan umat lain non-Hindu. Hubungan struktural menyangkut keterlibatan umat Hindu dalam struktur pemerintahan daerah tersebut. Umat Hindu termasuk warga yang aktif dalam usaha memajukan daerahnya atau termasuk warga yang pasif terhadap perkembangan daerahnya. Pekerja sosial dalam masyarakat Hindu diharapkan dapat menjadi pembimbing masyarakat Hindu agar dapat menjadi warga negara yang baik. Analisis terhadap kultur dan historis juga sangat diperlukan, karena hal ini akan memudahkan para pekerja sosial Hindu melakukan adaptasi dengan masyarakat dan lingkungannya.

2.1 Prinsip ISADEKTA (*Iksa, Sakti, Desa, Kala, dan Tattwa*) dalam Pembinaan Umat Hindu di Wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

Dalam pustaka Manawadharma Sastra terdapat penjelasan, agar penerapan *dharma* sebagai kebenaran itu sukses (*Dharma Sidhyartha*), maka penerapannya harus berdasarkan pertimbangan tertentu. *Seloka* yang menyatakan demikian adalah berikut ini.

*“Karyam so’ weksya çaktimca,
Deçakalam ca tattwatah,
Kurute dharma siddhiartham,
Wiçwarupam punah-punah”*

(Manawadharma Sastra,

VII.10)

Terjemahan :

Setelah melihat sepenuhnya maksud kekuatan dan tempat, waktu, serta pemikiran yang baik untuk mencapai keadilan, ia menjadikan dirinya menjadi bermacam wujudnya, untuk mencapai keadilan yang sempurna.

Seloka tersebut menjelaskan bahwa keadilan yang sempurna akan didapat bila berpijak pada kebenaran; dan kebenaran itu sendiri dalam penerapannya harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, yakni *Iksa* artinya melihat, visi, atau gambaran ke depan seseorang dan

masyarakat; *Sakti* artinya kemampuan seseorang atau masyarakat. *Desa* artinya keadaan setempat atau kondisi wilayah; dan *Kala* artinya waktu. *Tattwa* adalah sesuatu yang paling prinsip, pemikiran, kebenaran, atau kebenaran dalam Weda itu sendiri.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan terhadap suatu masyarakat akan dapat berhasil dan berkembang jika dalam pelaksanaannya memakai analisis yang benar. Berpedoman pada Pustaka Suci Manawadharma Sastra, maka dalam penelitian ini ditawarkan suatu prinsip manajemen dalam Hindu sebagai upaya pembinaan agama atau penerapan nilai-nilai ajaran Hindu pada masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Prinsip-prinsip itu disebut ISADEKTA yang merupakan akronim dari *Iksa*, *Sakti*, *Desa*, *Kala*, dan *Tattwa*.

Prinsip ISADEKTA ini, jika diterapkan untuk membina masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dapat dijabarkan sebagai berikut. Prinsip *Iksa* maksudnya, dalam pembinaan harus dapat melihat ke depannya, atau dalam hal ini adalah visi atau cita-cita yang jelas. Tujuan pembinaan hendaknya mampu untuk mengajak masyarakat sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Sebagai contoh, tujuan pembinaan dimaksudkan untuk membina masyarakat Hindu supaya berpola pikir atau memiliki sikap mental yang baik, dan mandiri. Untuk itu dalam pembinaan seorang pembina harus mampu memotivasi masyarakat agar dapat menampilkan dirinya lebih baik.

Bakker dalam Damami (2002: 20) mengemukakan, bahwa masyarakat Jawa secara umum memiliki sistem berpikir *homologi antropokosmik*, yang berarti penyesuaian diri dengan tatanan manusia-dunia. Dalam tata pikir ini, setiap orang merasa tidak mampu secara penuh mengubah keadaan; manusia tidak mampu secara penuh menguasai kosmik (peristiwa alam). Pola pikir semacam ini yang pada akhirnya melahirkan kesadaran untuk

selalu kerja sama dengan orang lain; orang tidak dapat bekerja sendiri. Sisi negatif dari bentuk kerja sama, jika tidak diwarnai dengan dasar-dasar dinamika adalah munculnya sifat menggantungkan diri kepada orang lain. Hal yang paling berat bagi masyarakat awam, secara umum adalah jika merasa sendiri, tidak punya teman; karena sifat ini, tidak mengherankan, jika dalam satu desa tertentu, terdapat dua atau tiga KK umat Hindu, maka dalam tahun-tahun berikutnya umat tersebut akan beralih keluar dari Hindu, karena merasa tidak punya komunitas. Namun jika mendapat kunjungan dan motivasi dari sesama umat Hindu, dari luar lingkungannya, walaupun itu berbeda etnis dengannya, maka akan diterima dengan baik, bahkan kadang-kadang dianggap sebagai keluarga. Sisi negatif berikutnya adalah kepasrahan yang tidak diimbangi dengan perjuangan yang keras dan kreativitas. Akibatnya, karakter masyarakat seperti ini dapat membawa umat Hindu pada ketidakberdayaan, kurang percaya diri, dan merasa tidak mampu menggali potensi yang ada dalam diri. Kemampuan akan timbul jika mendapat dukungan dari pihak atau orang lain.; dengan kata lain masyarakat kurang mandiri.

Dampak lain dari sistem berpikir *homologi antropokosmik* jika dipakai untuk menganalisis pola pikir umat Hindu di Jawa adalah adanya sifat yang pasif terhadap suatu perubahan. Maksudnya, dalam berusaha “tidak mau menjemput bola,” tetapi lebih cenderung untuk “menunggu bola.” Sebagai contoh, secara umum masyarakat Hindu di Jawa Timur percaya dengan adanya legenda Sabdopalon Nayagenggong tentang kebangkitan agama Hindu. Namun masyarakat Hindu berpandangan bahwa kebangkitan tersebut dikehendaki oleh alam. Akibat dari pandangan ini, maka terdapat kecenderungan bahwa semuanya diserahkan pada kehendak alam, sehingga tidak ada usaha lebih intensif dan profesional dalam pembinaan umat

dengan harapan kebangkitan Hindu memang benar-benar terwujud.

Suseno (2003: 39) menjelaskan, dalam masyarakat Jawa terdapat prinsip rukun. Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Rukun berarti “berada dalam keadaan selaras”, “tenang dan tentram”, “tanpa perselisihan dan pertentangan”, “bersatu dalam maksud untuk saling membantu.” Rukun bisa juga diartikan sebagai usaha untuk menghindari pecahnya konflik-konflik. Penerapan yang salah terhadap prinsip rukun dalam upaya untuk menghindari konflik dalam masyarakat Hindu di Jawa Timur dapat berakibat fatal. Berlandaskan pada alasan “tidak mau ramai” atau “tidak mau ribut-ribut” justru yang terjadi adalah sebuah ketidaktegasaan dalam memutuskan sesuatu. Akibatnya, umat Hindu cenderung pasif dan menerima segala yang terjadi padanya.

Mengacu pada konsep *Iksa* di sini, pembinaan masyarakat Hindu di Jawa Timur adalah terwujudnya masyarakat Hindu yang mantap dengan *sraddha*-nya, kreatif, dan mandiri. Kemantapan *sraddha* bagi umat Hindu di Jawa Timur sangatlah penting. Hal ini karena secara umum penganut Hindu di Jawa Timur lebih rentan terhadap konversi jika dibandingkan dengan penganut agama lain. Sehingga pembekalan terhadap nilai-nilai agama sangat bermanfaat dalam peningkatan *sraddha*-nya. Demikian juga dengan kreativitas dan kemandirian. Kreativitas merupakan sebuah kemampuan untuk menghasilkan sebuah ciptaan. Masyarakat yang kreatif cenderung produktif; sehingga dari kreativitas dan produktifnya masyarakat, akan berimbas pada kemakmuran. Hal ini artinya akan terbentuk masyarakat yang mandiri.

Sakti diartikan sebagai kekuatan dan kemampuan. Kemampuan dan kekuatan menjadi pertimbangan, karena di dalamnya menyangkut kekuatan dan potensi masyarakat. Analisa tentang kemampuan perlu dilakukan agar penerapan nilai-nilai ajaran Hindu akan memberikan

kekuatan kepada umat Hindu dalam meningkatkan keluhuran moral dan kekuatan mental dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain hal tersebut tujuannya adalah untuk menghindari adanya anggapan bahwa tugas keagamaan yang wajib dilaksanakan oleh umat Hindu merupakan suatu beban. Sebaliknya, justru semakin termotivasi untuk mengembangkan diri guna meraih hidup yang lebih baik.

Kekuatan dan kemampuan yang dimaksud dalam bahasan ini mengarah pada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh umat Hindu, kondisi sumber daya manusia, yang termasuk di dalamnya adalah menyangkut keadaan ekonomi, pendidikan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan. Secara ekonomi rata-rata masyarakat Hindu di Wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur masih termasuk dalam golongan ekonomi yang cukup, walaupun masih ada beberapa keluarga yang tergolong ekonomi rendah. Dalam bidang pendidikan, rata-rata masih berkutat dalam pendidikan menengah, hanya ada beberapa sarjana Hindu. Menyangkut masalah ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan, terutama menyangkut agama, masyarakat Hindu, di Wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur masih tergolong *rentan* terhadap usaha *konversi* agama dari pihak lain. Baru sepuluh tahun terakhir ini terlihat stabil, artinya konversi agama sudah jarang ditemukan, kecuali melalui perkawinan dan hal-hal yang sifatnya pribadi.

Pertimbangan berikutnya adalah *Desa*, dimaksudkan sebagai lingkungan atau tempat masyarakat Hindu berada. Masyarakat Hindu di Jawa Timur, khususnya di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tinggal di daerah transisi dan berada dalam lingkungan masyarakat yang heterogen. Maksudnya hidup berdampingan dengan penganut agama lain. Konsep *Desa* juga menyangkut tentang *kultur* masyarakat Hindu di Jawa Timur.

Keadaan atau kondisi masyarakat perlu dilihat sebagai pertimbangan yang strategis, karena kalau salah mengelola keadaan yang ada dalam masyarakat justru akan terjadi konflik.

Prinsip *Kala* yang dimaksud dalam bahasan ini adalah waktu yang tepat. Waktu yang dimaksud tidak hanya mengandung arti denotatif, yaitu arti yang sebenarnya, tetapi juga berarti situasi yang terdapat pada masyarakat yang bersangkutan, sehingga hal ini juga menjadi analisis dan pertimbangan dalam pembinaan. Prinsip berikutnya adalah *Tattwa*, yaitu hakekat kebenaran dalam Weda itu sendiri. Maksudnya, pembinaan yang dilaksanakan harus berlandaskan pada pemikiran yang baik, tujuan yang mulia, tanpa pamrih. Itulah salah satu bentuk kebenaran. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan pada dasarnya adalah bentuk dari *sewa* (pelayanan). Pelayanan yang dilakukan terhadap sesama dengan rasa keiklasan, merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan. Mengacu pada prinsip ISADEKTA tersebut, maka dapat dikatakan bahwa usaha pembinaan atau penerapan nilai-nilai Hindu perlu memperhitungkan prinsip *Iksa*, *Sakti*, *Desa*, dan *Kala*, sedangkan landasan dalam pembinaan tersebut adalah *Tattwa*.

3 PENUTUP

Umat Hindu di wilayah Kecamatan Ampelgading, kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur merupakan bagian integral dari umat Hindu yang ada di Indonesia, untuk itu keberadaannya harus mendapat perhatian. Perhatian yang dimaksud adalah dalam bentuk pembinaan yang kontinyu terhadap masyarakat, dengan lebih mengutamakan penekanan pada *sraddha* atau pembangunan “Pura Rohani”.

Selama ini pembinaan yang ada lebih banyak berfokus pada permasalahan-permasalahan fisik saja, seperti: pembangunan fisik Pura, tatacara ritual, dan tatacara berpakaian. Untuk itu perlu adanya pembinaan secara kontinyu dan *ajeg* guna terjadinya transformasi pola pikir,

agar umat Hindu di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dapat menggali potensi dalam diri, sehingga dapat berdiri sejajar dengan seluruh umat beragama.

Esensi dalam pembinaan masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur lebih baik diarahkan pada pembangunan “Pura Rohani” atau pengetahuan agama dan pendidikan, sehingga umat memiliki kemampuan untuk mempertahankan agamanya, dan mantap dalam *sradhanya*. Alasan bahwa pembangunan “Pura Rohani” sangat dibutuhkan oleh umat Hindu adalah, jika “Pura Rohani” yang dibangun, dengan sendirinya umat Hindu akan berusaha untuk mewujudkan dan membangun “Pura Fisik”. Namun jika “Pura Fisik” yang terus menerus dibangun tanpa diimbangi dengan pembangunan “Pura Rohani”, maka pelan tapi pasti “Pura Fisik” tersebut akan ditinggalkan, dan hanya akan menjadi bangunan atau tumpukan batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Jomo, 1986. *Membangun Masyarakat*. Bandung: PT Alumni
- Kaplan dan Manners, 1999. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Liliweri, 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Pustaka.
- Narwoko dan Suyanto, 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pakan, 1997. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Delta Pamingkas.
- Tim Penyusun, TT. *Pedoman Pembinaan Agama Hindu*.
- Rindjin, 1987. *Pengantar Filsafat Ilmu dan Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Kayumas.

- Soekanto, 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, 2006. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tim Prema Pena, TT. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.
- Veeger, 1993. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pudja, Sudharta. 2003. *Manawadharma Sastra*. Surabaya: Paramita.